

JURNAL

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA



Diajukan oleh :

HENRY FIRNANTO

N P M : 100510240

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2017

HALAMAN PERSETUJUAN JURNAL

**UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA**



Diajukan Oleh :

HENRY FIRNANTO

NPM : 100510240

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui

Dosen Pembimbing

Tanggal : 22 Maret 2017

P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., MS.

Tanda Tangan:

.....

UPAYA BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA

Penulis : Henry Firnanto

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya

Henry.jgja@gmail.com

ABSTRACT

The title of this legal writing is “ The National Narcotics Agency Province Yogyakarta In The Eradication Of Narcotics”. The aim of the author is to know how and narcotics. The method used is a normative legal method, this method focuses on the applicable legal rules, The legal basis used is regulation No. 35 year 2009. Result from this study is that the implementation of the narcotics in region of Yogyakarta has been quite good, but still there some obstacles are still lack of the personnel and the limited budget received. Based on those constraints author gives suggestions for National Narcotics Agency Province Yogyakarta in order to add more personnel and to be more selective in choosing the personnel as well as updating the equipments that can support in the eradication of narcotics.

Keyword: narcotics, eradication, personnel

1. PENDAHULUAN

Pada saat ini peredaran narkotika di Indonesia telah meningkat pesat, maka dapat diperkirakan bahwa kejahatan narkotika pada masa mendatang akan semakin mengawatirkan seiring dengan perkembangan masyarakat. Hal ini ditandai dengan munculnya modus operandi kejahatan dengan memanfaatkan teknologi di bidang komunikasi, transportasi dan informasi sebagai sarana dalam melakukan kejahatannya. Kejahatan narkotika salah satu dari berbagai macam jenis kejahatan terorganisir yang sangat sulit untuk diungkap, baik secara kualitas maupun kuantitas, karena mempunyai organisasi terselubung dan tertutup serta terorganisir secara nasional maupun internasional dengan jaringan yang meliputi hampir diseluruh dunia. Kejahatan narkotika merupakan kejahatan yang tidak mengenal batas wilayah, dengan modus operandi yang sangat rapiserta mobilitas tinggi, sangat membahayakan bagi kelangsungan hidup generasi mendatang,

Hal ini ditandai dengan terungkapnya penyelundupan narkotika setidaknya lebih kurang 850 kg sabu-sabu asal Guangzhou, Tiongkok oleh Badan Narkotika Nasional (BNN)¹. Peredaran narkotika yang begitu pesatnya dapat merusak generasi penerus bangsa, oleh sebab itu peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam memberantas peredaran Narkotika sangat diperlukan. Menurut kepala BNN Indonesia sudah darurat bahaya narkoba, sebelumnya pada bulan Juni 2015 tercatat 4,2 juta dan pada

November meningkat signifikan hingga 5,9 juta. Selain itu di Asean, Indonesia adalah pangsa pasar terbesar untuk penjualan narkoba, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailan. Pada tahun 2015 Badan Narkotika Nasional berhasil mengamankan 3 ton sabu yang berarti menyelamatkan banyak generasi muda². Peredaran narkotika nampaknya telah meluas di seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di lingkungan kota kota besar ataupun daerah saja akan tetapi sudah masuk kedalam lembaga pendidikan bahkan instansi pemerintahan di Indonesiapun tidak luput dari peredaran narkotika. Sedangkan Daerah Istimewa Yogyakarta meskipun peringkat kasus penyalahgunaan narkoba turun dari posisi lima besar akan tetapi BNN masih menetapkan yogyakarta sebagai darurat narkoba pasalnya pada tahun 2015 BNN mencatat pertambahan sekitar 36.000 pecandu baru, fakta itu semakin diperkuat dengan temuan 50kg ganja kering bernilai 250 juta yang merupakan temuan terbesar yang pernah diungkap pemerintah DIY sampai saat ini³.

Menurut Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 1 narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahankesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Dari pengertian narkotika menurut pasal 1 Undang

¹<http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/08/nhtlp5-ini-dia-penangkapan-penyeludupan-narkoba-terbesar-sepanjang-sejarah-bnn>

²<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>

³<http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/14/kasus-narkoba-diy-bnn-temukan-36-000-pecandu-baru-di-diy-691028>

Undang Nomor 35 tahun 2009, narkoba menjadi suatu ketergantungan untuk pecandunya sehingga sangat sulit bagi pecandu untuk melepaskan diri dari ketergantungan narkoba.

Badan Narkotika Nasional adalah sebuah lembaga pemerintahan non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan dibidang pencegahan dan pemberantasan narkoba. Badan Narkotika Nasional dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada presiden melalui Kepala Kepolisian Republik Indonesia⁴. Tugas dan kewenangan Badan Narkotika Nasional menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Dengan maraknya peredaran narkoba di seluruh wilayah Indonesia dan juga untuk efektifitas melakukan pencegahan dan pemberantasan narkoba di daerah-daerah maka dibentuklah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) di setiap ibu kota provinsi diseluruh Indonesia, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Salah satunya adalah Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan dapat menyeleggarakan tugas, wewenang dan fungsi dalam melakukan pencegahan, penanganan dan pemberantasan Narkoba sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional.

Peran BNNP DIY dalam pemberantasan narkoba dianggap sangat penting, karena semakin

banyaknya peredaran narkoba di wilayah Yogyakarta. Oleh karena itu efektifitas BNN sangat diperlukan, mengingat semakin banyaknya peredaran narkoba dan semakin banyak korban akibat penyalahgunaan narkoba. Bukan hanya BNNP DIY saja yang memerangi serta memberantas peredaran narkoba akan tetapi seluruh elemen masyarakat memiliki peranan yang sangat penting untuk memberantas peredaran narkoba. Dengan adanya kesinergisan antara seluruh elemen masyarakat dan BNNP DIY maka dapat menyelamatkan generasi muda dari ambang kehancuran karena narkoba.

2. Metode Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memerlukan bahan hukum sekunder sebagai data utama. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya Badan Narkotika Nasional dalam pemberantasan narkoba

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.

b. Bahan Hukum Sekunder adalah pendapat hukum yang diperoleh dari bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hukum yang diperoleh dari buku-buku (literatur), jurnal, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan

⁴Badan Narkotika Nasional, Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum, 2009, Jakarta, hlm 74

pendapat yang berkaitan dengan permasalahan tentang upaya Badan

3. HASIL DAN PENELITIAN

Masyarakat Indonesia saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat maraknya pemakaian narkoba yang hampir ada di setiap wilayah Indonesia. Masalah penyalahgunaan narkoba di Indonesia, pada saat ini sudah sangat memprihatinkan. Narkoba dapat mudah masuk ke wilayah Indonesia karena wilayah Indonesia terletak pada posisi yang strategis yang mana letaknya diantara tiga benua. Pengaruh globalisasi, arus transportasi yang sangat maju menjadi faktor penunjang wilayah Indonesia menjadi sasaran empuk peredaran narkoba.

Sementara itu Provinsi Yogyakarta dapat dikatakan sebagai miniatur Indonesia, karena Yogyakarta merupakan kota pelajar. Dimana para pelajar datang dari seluruh provinsi baik dari sabang maupun sampai merauke. Hal ini menjadi salah satu sumber maraknya peredaran narkoba di wilayah Yogyakarta, terbukti Pada tahun 2015 DIY menduduki rangking delapan dalam kasus penyalahgunaan narkoba dengan angka sebanyak 60.182 jiwa. Berdasarkan hasil wawancara dapat dikatakan Upaya-upaya yang dilakukan oleh Badan Narkoba Nasional Provinsi DIY, Upaya preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan dengan sasaran untuk memerangi faktor-faktor penyebab, pendorong dan faktor peluang dari adanya kejahatan peredaran narkoba. Upaya ini menciptakan suatu kondisi kesadaran kewaspadaan dan daya tangkal serta terbina dan terciptanya kondisi perilaku dan norma hidup bebas dari segala ancaman narkoba. Ada pembinaan dan penyuluhan yang dilakukan oleh Badan

Narkoba Nasional dalam pemberantasan narkoba.

Narkoba Nasional tentang bahaya narkoba kepada masyarakat.

Perlunya membina hubungan yang baik dengan masyarakat. Pembinaan dan pengembangan pola hidup masyarakat. menciptakan hubungan yang harmonis antar sesama warga masyarakat sehingga timbul kesadaran dalam diri masyarakat untuk dapat menjaga keamanan didalam lingkungan mereka sendiri. badan narkoba nasional memberikan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba kepada masyarakat melalui tokoh masyarakat setempat yang nantinya informasi tersebut akan diteruskan kepada anggota masyarakat lainnya. Memberikan bimbingan kepada masyarakat hingga memperkenalkan kepada masyarakat apa-apa saja yang termasuk kedalam kategori narkoba, termasuk tanaman yang dikategorikan narkoba seperti ganja, heroin. Tujuannya agar mereka paham kalau menanam dan memelihara tanaman ganja termasuk kedalam penyalahgunaan narkoba. Sarana sosialisasi ini sendiri juga harus menggunakan pendekatan yang sesuai dengan jenjang usia yang ada, idealnya untuk remaja dan anak-anak media internet dan televisi sangatlah ampuh dalam program ini. Bila dalam diri masyarakat telah tertanam pengetahuan mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba tentu peredaran gelap narkoba dapat ditekan seminimal mungkin.

Badan Narkoba Nasional Provinsi DIY (BNNP DIY) juga melakukan sosialisai tentang bahaya narkoba ke pelajar-pelajar di kota Yogyakarta, dalam beberapa waktu lalu BNNP DIY bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga DIY

diruang auditorium Dikpora DIY melakukan sosialisasi kepada pelajar dan lain sebagainya, terhadap upaya-upaya penting yang perlu diambil dalam rangka mencegah bahaya narkoba ditingkat pelajar. BNNP DIY juga melakukan sosialisai dengan guru-guru swasta yang dilaksanakan di Unit IX Biro Umum Humas Setda Daerah Istimewa Yogyakarta dan dihadiri oleh 41 guru swasta. Para guru swasta ini diharapkan nantinya dapat menjadi pelopor dalam program P4GN di lingkungan pendidikan.

Upaya represif yang dilakukan badan narkotika nasional antara lain meliputi rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan terhadap semua kasus tindak pidana narkotika yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman faktual. Tindakan yang dilakukan Badan Narkotika Nasional Provinsi Diy dalam pemberantasan peredaran narkotika menurut UU No 35 Tahun 2009 diantaranya Melaksanakan kebijakan nasional di bidang P4GN Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap dan prekursor narkotika. Menangkap dan menahan orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, memeriksa, menggeledah dan menyita barang bukti P4GN, berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam P4GN, melakukan tehnik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan berdasarkan pengawasan, melakukan penyadapan yang terkait dengan P4GN setelah mendapat bukti awal yang cukup, melakukan operasi dan tes urine yang bekerja sama dengan pihak pihak terkait angkasa pura, pemerintah, bea cukai dan imigrasi di tempat-tempat

yang berpotensi menjadi sasaran peredaran narkotika, kegiatan operasi ini dilakukan secara rutin seminggu dua kali dengan waktu yang tidak ditentukan. Sasaran tempat operasi ini biasanya di tempat-tempat hiburan malam, indekost, penginapan, rusunawa dan tempat-tempat lainya yang terindikasi adanya peredaran narkotika.

Merebaknya peredaran narkotika dan di Provinsi Yogyakarta merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Diy. Secara teoritis sebenarnya pemberantasan narkotika tidaklah sulit. Dengan mengacu pada hukum formal yang berlaku maka pemakai dan juga pengedar yang menjual narkotika harus ditangkap, ditahan, disidik, dituntut dan pada akhirnya akan diputus oleh hakim. Namun secara prakteknya di lapangan Badan Narkotika Nasional Provinsi Diy banyak menemukan berbagai hambatan. Hambatan dari dalam (intern), Kurangnya koordinasi di lapangan pada saat akan mengadakan operasi-operasi/ razia di tempat-tempat yang menjadi obyek sasaran, ketika melakukan penggeledahan barang bukti biasanya disembunyikan pada suatu tempat dan sulit untuk ditemukan, ketika melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung, terkadang teknik ini tidak berjalan sesuai rencana dikarenakan pengedar maupun Bandar sudah mengetahui rencana tersebut, adanya oknum yang memberikan/ membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi/razia. Serta adanya ketidak profesionalisme dari oknum anggota Polisi maupun Badan Narkotika Nasional sendiri, seperti adanya oknum anggota yang tidak menangkap pengedar narkotika karena adanya hubungan keluarga

ataupun karena telah dibayar untuk menjadi “backing” bagi pengedar narkotik, kurangnya koordinasi dengan kepolisian atau instansi terkait, baik di dalam proses pencegahan maupun proses pemberantasan narkotika. Dalam proses pemberantasan di wilayah Yogyakarta yang sering menjadi kendala adalah kurang proaktifnya lembaga pendidikan di Yogyakarta. Hambatan dari luar (ekstern) sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar instansi badan narkotika nasional. Besarnya biaya yang timbul akibat penyalahgunaan narkotika tentunya harus dibarengi dengan peningkatan biaya yang dipergunakan untuk pembiayaan pengungkapan penyalahgunaan narkotika, tanpa dukungan dari berbagai pihak terutama pemerintah maka penyidikan dalam penanganan penyalahgunaan narkotika akan sulit dilakukan. Minimnya anggaran membuat tidak maksimalnya atau tidak efektifnya dalam hal mengungkap penyalahgunaan narkotika maupun psikotropika. Saat ini, anggaran yang dikeluarkan dalam rangka penyelidikan dan penyidikan dalam mengungkap dan atau untuk dapat menegakkan hukum dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika belum mencukupi sehingga dalam menuntaskan penegakan hukum masih terkendala dan tidak memuaskan. Sarana-sarana teknologi yang modern untuk mendeteksi peredaran narkotika perlu diperbaharui mengingat semakin canggih para penyelundup barang haram tersebut masuk Indonesia, Adanya ketidakpedulian masyarakat di dalam proses pencegahan pemberantasan tindak pidana narkotika dan psikotropika, semakin kuatnya jaringan pengedar narkotika dan psikotropika merupakan salah satu hambatan terbesar dalam

proses pencegahandan pemberantasan narkotika dan psikotropika, merebaknya peredaran narkotika dan di Provinsi Yogyakarta merupakan tantangan bagi aparat penegak hukum khususnya Badan Narkotika Nasional Provinsi Diy. Secara teoritis sebenarnya pemberantasan narkotika tidaklah sulit. Dengan mengacu pada hukum formal yang berlaku maka pemakai dan juga pengedar yang menjual narkotika harus ditangkap, ditahan, disidik, dituntut dan pada akhirnya akan diputus oleh hakim.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis tentang Upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa pemberantasan narkotika di Yogyakarta belum sepenuhnya sesuai dengan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan juga Perpres No 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional, karena masih ditemukanya kendala-kendala baik berupa kendala intern Kurangnya koordinasi di lapangan pada saat akan mengadakan operasi-operasi/razia di tempat-tempat yang menjadi obyek sasaran. Adanya oknum yang memberikan/ membocorkan informasi kepada orang luar saat akan diadakan operasi/razia. Dan juga kendala eksternal Sarana yang kurang memadai dan dukungan dana yang minim merupakan hambatan dari luar instansi badan narkotika nasional.

5. REFRENSI

BUKU

Hari Sasangka. 2003. Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana. Mandar Maju. Bandung

Badan Narkotika Nasional.2009. Pedoman Petugas Penyuluhan P4GN di lingkungan hukum, Jakarta

BNN,2006,Modul Pelatihan Petugas Rehabilitasi Sosial Dalam Pelaksanaan Program ONE STOP CENTRE (OSC), BADAN NARKOTIKA NASIONAL R.I PUSAT LABORATORIUM TERAPI DAN REHABILITASI,Jakarta

Soedjono.D.1987. Hukum Narkotika Indonesia.Penerbit Alumni. Bandung.

Soerjono Soekanto, 2009, Pokok-pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Website :

<http://m.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/01/08/nhtlp5-ini-dia-penangkapan-penyeludupan-narkoba-terbesar-sepanjang-sejarah-bnn> diakses tanggal 13 juli 2016

<http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang> diakses tanggal 13 juli 2016

<http://www.harianjogja.com/baca/2016/02/14/kasus-narkoba-diy-bnn-temukan-36-000-pecandu-baru-di-diy-691028> diakses tanggal 13 juli 2016

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Provinsi diakses tanggal 13 juli 2016

<https://id.wikipedia.org/wiki/Narkoba> diakses tanggal 13 juli 2016

kbbi.web.id/upaya diakses tanggal 13 juli 2016

http://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Narkotika_Nasional_Provinsi diakses tanggal 13 juli 2016

<http://www.organisasi.org/1970/01/arti-definisi-pengertian-narkotika-dan-golongan-jenis-bahan-narkotik-pengetahuan-narkotika-dan-psikotropika-dasar.html> diakses pada hari jumat senin 30 September 2016

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden Republik Indonesia No 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.